

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dharma Setyawan Salam, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan , Nilai, dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2002.

I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Philipus M. Hadjon, 1985, *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya.

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### Jurnal.

Irawan, B. 2008. Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Konversi Lahan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 26 (2): 116-131.

Jamal, E. 2001. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Harga Lahan Sawah pada Proses Alih Fungsi Lahan ke Penggunaan Non Pertanian: Studi Kasus di Beberapa Desa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 19 (1): 45-63.

Rusastra, I.W. dan Budhi, G.S. 1997. Konversi Lahan Pertanian dan Strategi Antisipatif dalam Penanggulangannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Vol. XVI (4) : 107–113. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogo.

Witjaksono, R. 1996. Alih Fungsi Lahan: Suatu Tinjauan Sosiologis. Dalam *Prosiding Lokakarya “ Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air”*: Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 113 - 120. Hasil Kerja sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor.

Rusastra, I W. dan G.S. Budhi. 1997. Konversi Lahan Pertanian dan Strategi Antisipatif dalam Penanggulangannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Vol. XVI, Nomor 4 : 107 – 113. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.

Mintarti Indartini, Choirum Rindah Istiqaroh, dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap alih profesi dan kesejahteraan petani di kota madiun. *Ekomaks Volume 4 No. 1 Maret 2015*.

Y. Cahyo Kristiyono, Implementasi Alih Fungsi Penggunaan tanah Dari Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di kabupaten klaten berdasarkan UU No. 26. Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, *Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017*.

Intan Mulia Sari, T. M. Nur, Zurani, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Tambak Di Desa Beurawang Kecamatan Jeumpakabupaten Bireuen. *Jurnal S. Pertanian 1 (2) : 134 – 141 (2017)*.

Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sarjana, Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan) *Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 3, No. 2, Oktober 2015*.

Suwitno Y. Imran. Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013*.

### **Laporan Hasil Penelitian dan Makalah**

Hafsjah, J. 2003. Deptan menahan laju konversi lahan pertanian. Makalah pada Seminar Pengelolaan Sumberdaya Pertanian Dalam Rangka Menunjang Agropolitan. Surakarta. 28 Mei 2003.

Irawan, B., Purwoto A., Saleh C., Supriatna A. dan Kirom, N.A. 2000. Pengembangan Model Kelembagaan Reservasi Lahan Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Musa, A.M. 2013. Ancaman Krisis Pangan 2014. Makalah pada Seminar Nasional Peningkatan Produksi Pangan dan Cadangan Pangan Masyarakat untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional. Fakultas Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Penelitian Joko Sutrisno, Sugihardjodan Umi Barokah' *Pentingnya Pendekatan Sistem Dalam Menganalisis Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah* Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Peer Group PPKWU LPPM UNS.

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Kantor Statistik Kabupaten Kudus Tahun 2016.

Keppres Nomor 33 Tahun 1990 pengendalian pemanfaatan tanah dalam proses penggunaan tanah.

Keppres Nomor 53 Tahun 1989 dan Keppres Nomor 33 Tahun 1990.

Penjelasan umum poin 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Penjelasan umum poin 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 63 UU Tata Ruang.

Penjelasan umum poin 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 69 ayat (1) UU Tata Ruang.

Penjelasan umum poin 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 69 ayat (2) dan (3).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Perda peraturan daerah Kabupaten Kudus nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus tahun 2012-2032.

Sekilas Kota Kudus <http://www.musthofa-bupati.com>.

Sugiono 2015 "metode penelitian kombinasi". Bandung: Alfabeta. Halaman 301.

Sunarno, *Incorporating Good Land Governance In The Disaster Region Of Yogyakarta* DOI: 10.18196/jmh.2015.0044/ 1-16.

Suswono, 2011. Perlu Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan dengan Pendekatan Sosial Ekonomi. <http://www.sinartani.com> (30 Juni 2017).

UU. No.5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*,selanjutnya disebut UUPA pasal 14.

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.